

BAB IV

PEMBAHASAN

Malang Corruption Watch

Malang Corruption Watch atau disingkat MCW adalah LSM yang aktif dalam mengkampanyekan gerakan antikorupsi di kota Malang. Gerakan MCW adalah gerakan yang berbasis pada masyarakat sipil, jadi MCW dapat dikategorikan sebagai gerakan Non-Government Organization (NGO). Pada pembahasan riset ini akan dibahas mengenai efektivitas dan mekanisme strategi advokasi yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi di kota Malang tahun 2017-2019.

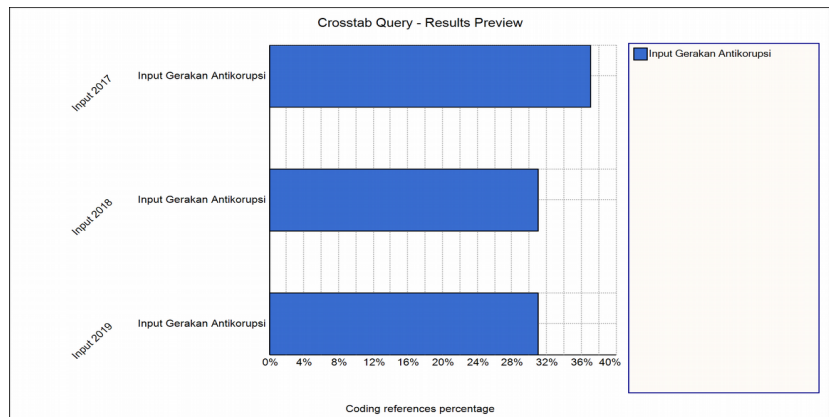
Penelitian ini membagi 3 komponen besar dalam pergerakan organisasi yaitu Input, proses, dan output. Input yang berarti program-program yang berkaitan dengan penguatan Organisasi dalam rangka terciptanya sebuah output. Sedangkan proses yaitu melaksanakan input untuk dijadikan sebuah output atau program. Dan output yang berarti sebuah program yang diberikan oleh organisasi untuk diterapkan kepada masyarakat

luas atau target yang dituju. Hasil pembahasan terkait input dan output MCW sebagai berikut;

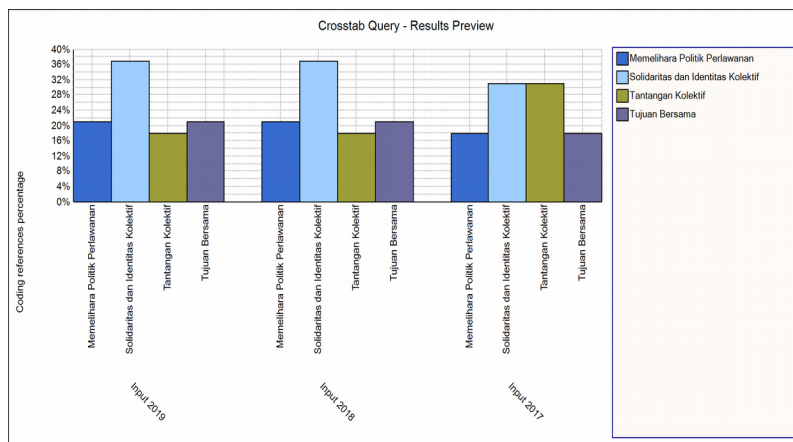
Strategi Advokasi MCW Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Politik;

4.1. Pendekatan Sumber

Gambar 1. Perbandingan Input 2017-2019



**Gambar 2. Perbandingan Input 2017-2019
Berdasarkan Indikator**



- Tantangan kolektif
 - Pendanaan

Pendanaan MCW berasal dari iuran dewan pengurus, adanya perusahaan intern untuk sumber pendanaan. Honor ketika mengisi suatu acara, kemitraan dengan Lembaga Lembaga

terkait ICW, dengan dunia Internasional, selama mitra bukan dari objek pantau, atau tidak punya relasi yang dekat dengan birokrasi. MCW dilarang menerima donor dana dari lembaga pantau.

- SDM

Sejak tahun 2010 MCW menempatkan mahasiswa sebagai badan pekerja di dalam pengorganisasiannya. Dalam membentuk badan pekerja, MCW menggunakan mekanisme yang disebut dengan SAKTI (sekolah anti korupsi).

SAKTI adalah sekolah perekrutan BP (Badan Pekerja) MCW yang berdurasi sekitar 9 bulan, diawali dengan pelatihan paratimatis ideologis, lalu ada sekolah intensif (membaca anggaran, analisis kasus korupsi, pengorganisasian warga) dan terakhir yaitu pokja atau magang. Kurikulum wajib yang diberikan kepada peserta

meliputi ideologi gerakan sosial, pengorganisasian, dan hukum korupsi.

Penjaringan peserta dilakukan melalui media online (karena faktor penggunaan gadget di lingkungan mahasiswa) dan pengiriman surat diberbagai LSM, komunitas dan kampus. SAKTI pada awal perencanaan diagendakan yaitu 1 tahun 2 kali dengan skema awal yaitu 6 bulanan, akan tetapi skema 2 kali dalam setahun hanya terjadi pada tahun 2018. Di tahun 2017 dan 2019 dilakukan hanya sekali, hal demikian dikarenakan penyesuaian program MCW dan ICW sebagai mitra kerja.

Dalam SAKTI, MCW sebagai mitra ICW. Dengan mekanisme, projek akademi antikorupsi milik ICW diadopsi menjadi sekolah antikorupsi milik MCW. Pengelolaan SAKTI seutuhnya oleh MCW sedangkan ICW berperan hanya sebagai kanal promosi online.

Dalam 1 angkatan SAKTI, jumlah peserta dapat mencapai 30 orang diawal. Akan tetapi di tahap ke 2 menurun jumlah pesertanya hingga 50%. SAKTI mempunyai 3 tahapan dalam setiap periodenya, pembagian tersebut meliputi pelatihan 3 hari, lalu sekolah intensif 3 bulan, dan diakhiri pokja atau magang 3 bulan.

Yang menjadi problem SAKTI adalah proses keikutsertaan peserta SAKTI itu sendiri, yaitu jumlah peserta hanya berkisar 5 mahasiswa saja yang mengikuti hingga akhir tahapan. Alasan tidak lanjutnya peserta dalam sekolah SAKTI yaitu bermacam macam, seperti faktor perantauan dimana mahasiswa yang mengikuti SAKTI biasanya dituntut dalam hal waktu, artinya jika telah selesai menjalankan fungsinya sebagai mahasiswa, mereka diminta segera untuk pulang ke kampung halaman. Akan tetapi MCW mempunyai mekanisme tersendiri kepada peserta SAKTI yang gugur di tahap pertengahan, yaitu

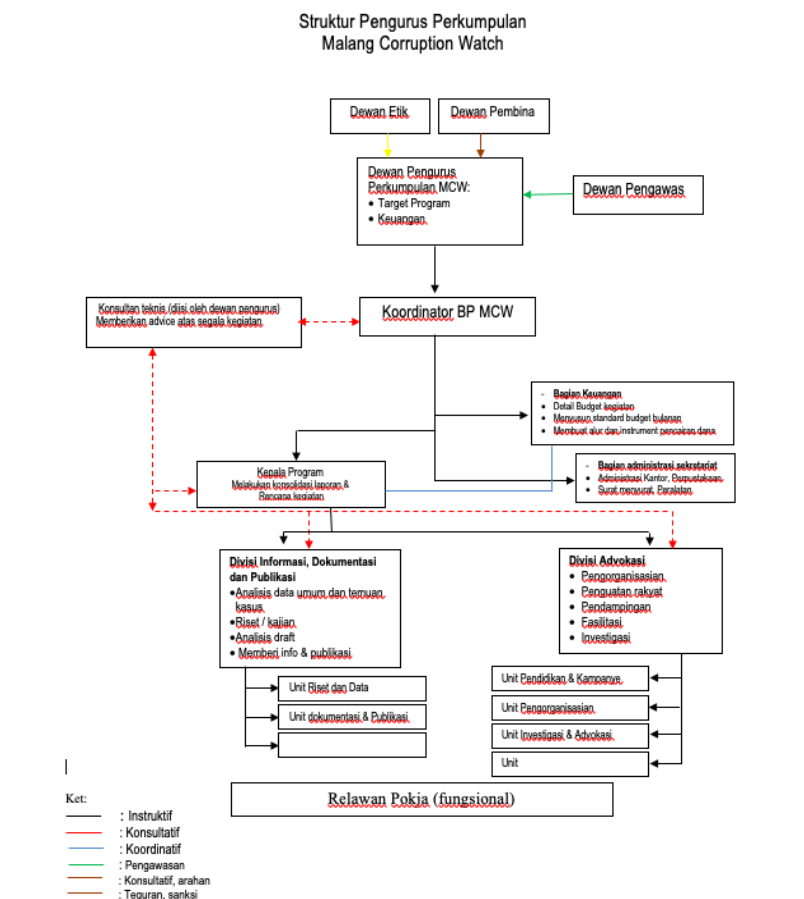
menjadikan mereka agen-agen antikorupsi di tingkat kampus atau didaerahnya.

Kegiatan SAKTI dilakukan di sekretariat MCW. Akan tetapi tidak hanya itu saja, MCW bekerjasama dengan beberapa BEM di kota Malang untuk mengadakan SAKTI *on campus*. SAKTI *on campus* dilaksanakan pada tahun 2017-2018 awal (1 angkatan) dengan durasi bermacam-macam yaitu, UMM berlangsung 2 hari, UNITRI berlangsung 3 bulan, UNMER berlangsung 3 bulan, UM,UB, dan POLINEMA berlangsung beberapa hari saja.

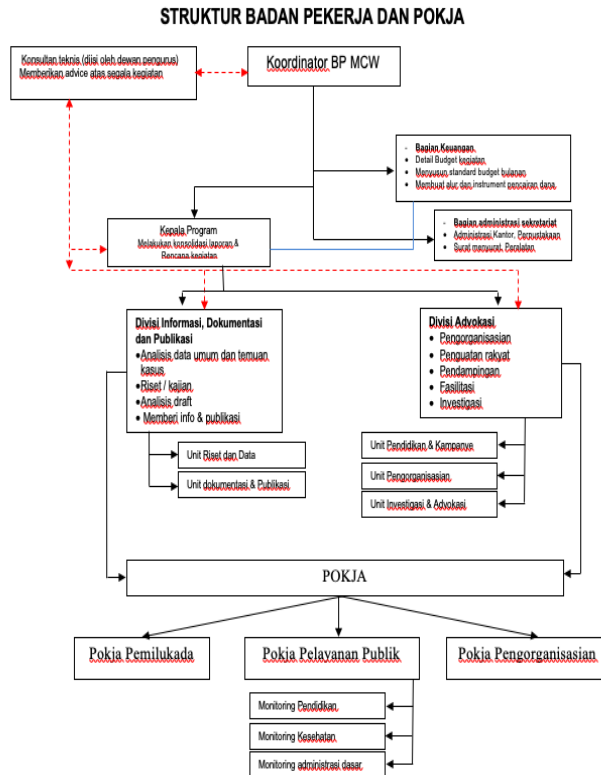
Relawan yang dihasilkan dari SAKTI tidak harus jadi BP, karena relawan tersebut adalah peserta dari SAKTI yang tidak bisa mengikuti sampai akhir tahapan. Sedang yang mengikuti sampai akhir tahapan, mereka diminta untuk menjadi Badan Pekerja MCW.

Berikut adalah susunan organisasi dalam
kepengurusan MCW:

Gambar 3. Struktur Pengurus MCW



Gambar 4. Struktur Badan Pekerja Dan Pokja



Pada pelaksanaan SAKTI 2017, MCW melakukan kerjasama dengan sejumlah kampus seperti BEM Universitas Tribuwana Tungadewi, BEM FISIP Universitas Merdeka, BEM Universitas Negeri Malang, dan BEM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas

Brawijaya. Model pelaksanaan tersebut ialah melibatkan 10 – 20 peserta dengan 4 – 5x pertemuan tatap muka.

Sementara pada pelaksanaan SAKTI terpusat pada bulan Agustus 2017 mendapatkan peminat yang cukup tinggi. Terdapat 24 peserta SAKTI terpilih dari Malang, dan 8 orang peserta dari luar kota seperti Blitar, Tulungagung, dan Bangkalan. Peserta SAKTI MCW mengikuti serangkaian proses rekrutmen dan pelatihan sebagai bentuk komitmen dalam gerakan anti korupsi selama Agustus – Desember 2017.

Pada pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi MCW, di akhir pelaksanaan Kelompok Kerja. MCW mendapatkan sejumlah penambahan relawan kerja yang meliputi:

1. 14 Orang Relawan Kader (Relawan yang berproses di MCW).
2. 3 Orang Relawan Buffer (Relawan yang berproses di kampus dan menjadi fungsionaris organisasi intra kampus).

3. 4 Orang Relawan Partisan (Relawan yang berpartisipasi dalam diskusi di MCW).
4. Relawan dari Luar Kota membentuk berbagai sekolah anti korupsi seperti Sekolah Pondok

Keadilan di Bangkalan Madura, Pelatihan Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Rakyat Pemberantasan Korupsi Blitar, dan Relawan Anti Korupsi (Reaksi) Tulungagung.

Selain mengadakan Sekolah Anti Korupsi, beberapa hal yang telah dilakukan MCW bersama pemuda pada tahun 2017, misalnya:

1. Bekerjasama dengan komunitas seni untuk kampanye anti korupsi di Malang Raya seperti pembuatan Film Dokumenter bersama Freacreative, Pemutaran Film Bioskop Warga bersama Rollab, Kampanye isu sosial politik bersama kelompok mural Turukene dan Streetart.
2. Bersama – sama melakukan advokasi kasus korupsi bersama mahasiswa UIN Malang terkait kasus korupsi

Pembangunan Kampus III UIN Malang dan Aksi bersama korupsi KTP-Elektronik serta Hak Angket Setya Novanto

3. Menjadi pemateri dan Fasilitator sejumlah materi di berbagai kampus Kota Malang terkait isu sosial politik, korupsi politik, maupun anggaran publik.

- Tujuan bersama

Dalam mencapai tujuan bersama, MCW melakukan kegiatan dengan cara menggunakan peningkatan kapasitas BP (Badan Pekerja) dan relawan. MCW mengadakan rapat mingguan, rapat kasus, dan rapat pengorganisasian. Adapun untuk beberapa komunitas yang bergabung dengan MCW yaitu dengan tata cara sebagai berikut, beberapa BP dijadikan relawan di beberapa komunitas dengan mekanisme pendampingan.

Beberapa program yang dijadikan kanal MCW dalam rangka pemenuhan tujuan bersama yaitu dengan cara pendidikan politik berbentuk forum warga, membentuk pos aduan, melakukan kampanye publik, melakukan konferensi pers, Jagongan Rakyat yang

dilakukan MCW sebagai kanal data dan fasilitator agar warga menjadikan jagongan tersebut untuk sarana menggugat langsung kepada pemangku kebijakan. Dalam jagongan rakyat tersebut adalah kegiatan yang dihasilkan dari berbagai forum warga.

Adapun hasil yang tercapai dari berbagai kanal diatas adalah terciptanya forum warga yang beralih menjadi gerakan yang kolektif serta terciptanya jaringan antikorupsi dari berbagai kalangan sebagai kekuatan dalam penguatan gerakan antikorupsi berbasis warga. 2 forum yang dihasilkan dari jagongan rakyat adalah forum masyarakat peduli kesehatan dan forum masyarakat peduli Pendidikan. Tujuan dari berbagai aktivitas diatas yaitu warga mampu mengadvokasi dirinya sendiri atau lingkungan sekitar secara mandiri ataupun kolektif.

- Solidaritas dan identitas kolektif

Solidaritas dan identitas bersama yang dilakukan oleh MCW adalah dengan cara menggait dan melebur

dengan berbagai komunitas di kota Malang. Komunitas tersebut meliputi AJI (Aliansi Jurnalistik Independent), koalisi advokat antikorupsi, gerakan mahasiswa diluar kampus, BEM kampus, rollab (komunitas pemutaran biokop), kartunis, FLAG, komunitas pembuat film dokumenter, komunitas difabel, akademisi, dan tokoh tokoh agama atau kelompok kelompok keagamaan.

Pendampingan di beberapa komunitas dan kelompok di atas dinilai efektif dalam gerakan pencegahan korupsi politik oleh MCW. Komunitas dan kelompok diatas menjadi kekuatan pendukung dalam gerakan MCW dalam Pendidikan, advokasi dan pelaporan kasus.

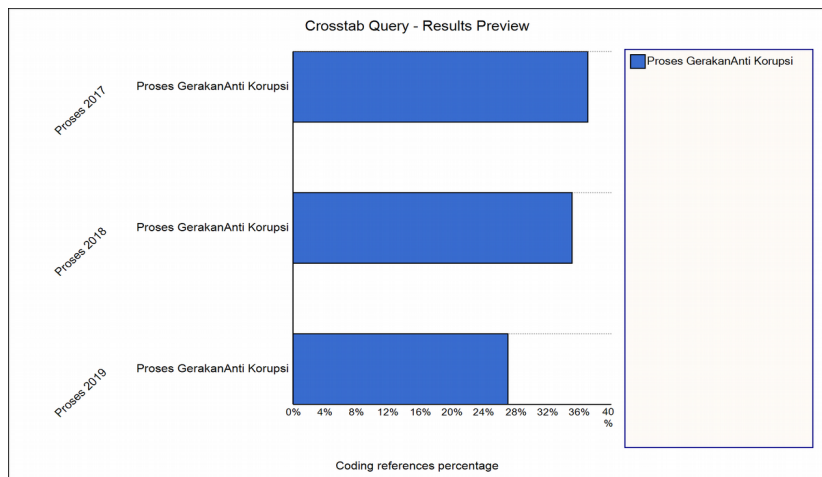
- o Memelihara politik perlawanan

Dalam memelihara politik perlawanan dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu, konsistensi, monitoring, dan evaluasi. Dalam konsistensi MCW melakukan dengan 3 cara yaitu penguatan kode etik, dengan cara menghidupkan forum warga, dan memelihara komunikasi dengan komunitas jejaring antiorupsi secara massif.

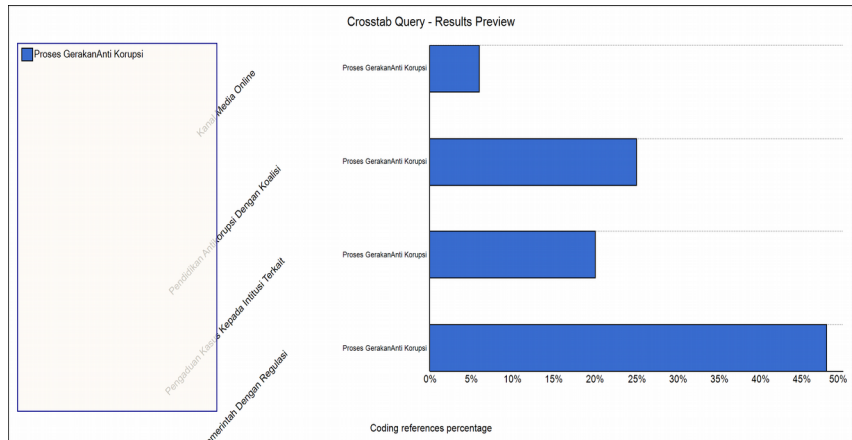
Terkait monitoring, MCW menggunakan cara rapat mingguan menggunakan rapat berbasis Issue dengan ahli ahli terkait bentuknya FGD. Dan pada tahapan evaluasi, MCW menggunakan laporan 3 Bulanan yaitu orum tertutup, laporan tengah tahun yaitu forum terbuka, dan laporan akhir tahun yaitu forum terbuka.

1. 4.2. Pendekatan Proses

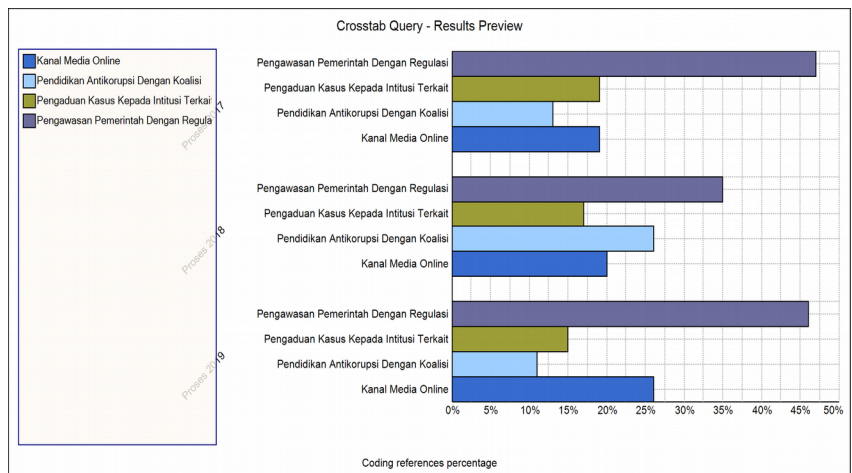
Gambar 5. Perbandingan Proses Tahun 2017-2019



Gambar 6. Perbandingan Indikator Proses Tahun 2017-2019



Gambar 7. Indikator Pertahun Dari Tahun 2017-2019



Berdasarkan hasil penelitian berbasis wawancara dan dokumen menghasilkan output sebagai berikut;

- Pendidikan antikorupsi melalui koalisi

Pendidikan merupakan konsep dasar yang harus dilakukan dalam melakukan aspek kognitif atau pemahaman. Pendidikan adalah ruh dalam suatu kegiatan organisasi, adapun beberapa cara yang dilakukan oleh MCW dalam rangka pemenuhan pendidikan antikorupsi melalui koalisi tersebut terbagi menjadi 2 bagian yaitu pengorganisasian dan kampanye antikorupsi.

Pengorganisasi yang dilakukan oleh MCW sebagai berikut; koperasi sebagai alat perjuangan, forum warga, sekolah rakyat, forum masyarakat peduli Pendidikan, dan forum masyarakat peduli kesehatan.

- Koperasi sebagai alat perjuangan

Gambar 8. Disain Koperasi MCW



Koperasi warga diharapkan mampu menjadi penopang kebutuhan ekonomi anggota forum warga dan mampu membiayai penyelenggaraan setiap forum warga. Setidaknya terdapat 4 koperasi warga: Koperasi Kalimetro, Koperasi perempuan mandiri, koperasi muharro dan koperasi setia kawan (Buruh).

Akan tetapi keberadaan koperasi ini hanya berusia 2 tahun saja tidak lebih. kurangnya kesadaran dan pemahaman warga terhadap makna dan fungsi koperasi sebagai alat perjuangan menjadikan kendala tersendiri dalam pelaksanaan program.

- Sekolah rakyat

Sekolah rakyat merupakan sarana untuk melakukan transformasi pengetahuan dan pengalaman, utamanya kepada aktor warga. Sekolah rakyat didesain dengan menggunakan strategi andragogis, peserta diajak untuk menyusun kebutuhan materi. Selain itu, peserta juga diminta untuk menjadi fasilitator pada setiap tatap muka sekolah rakyat. Beberapa materi sekolah rakyat berisi tentang HAM, Pelayanan Publik, Hukum, Tindak Pidana Korupsi dll. Tujuan dari sekolah rakyat adalah menyiapkan aktor-aktor warga yang siap dan kompeten untuk melakukan pengorganisasian dan advokasi diwilayah/daerahnya masing-masing. Selain itu juga membangun zona-zona anti korupsi, membuka pos

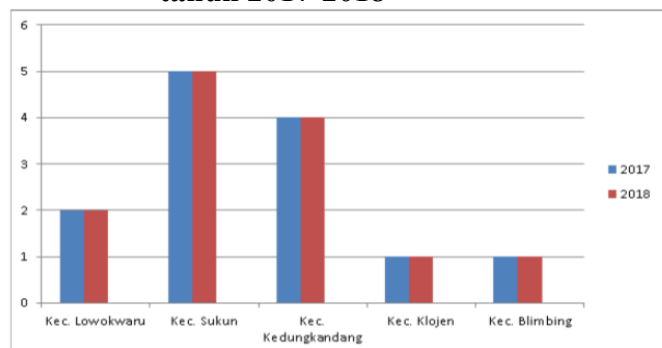
pengaduan dan melakukan pendidikan publik kepada warga sekitar. Dalam melakukan peningkatan kapasitas, monitoring, dan advokasi dibagi menjadi beberapa level.

Pada tahun 2017, sekolah rakyat berjalan cukup intens diawal-awal tahun hingga pertengahan tahun. Yang diikuti oleh setidaknya 10-15 orang warga.

- Forum warga

Selain melalui Sekolah Rakyat, untuk membangun kesadaran kritis warga, MCW melakukan aktivitas rutin berupa forum warga yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk diaspora gerakan pengorganisasian.

Gambar 9. Jumlah Forum Warga Kota Malang tahun 2017-2018



- FMPP dan FMPK

Untuk mengawal pelayanan publik yang berkualitas dan mengedepankan kepentingan masyarakat, maka dibutuhkan upaya bersama dalam mengawal dan monitoring pelayanan publik terkhusus di Malang Raya. Sehingga untuk monitoring pelayanan publik dibentuklah Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) terfokus pada pemantauan dan advokasi pelayanan pendidikan. Selain itu, pada awal tahun 2017 MCW membentuk kelompok masyarakat yang terfokus pada pelayanan kesehatan, yaitu Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK).

Dalam mendukung setiap aktivitas pengawalan pelayanan publik setiap kelompok warga (FMPP, FMPK) mengadakan pos pengaduan sebagai upaya penjangkaran informasi dari masyarakat mengenai keluhan atau permasalahan di pelayanan publik. Hasil informasi yang telah di dapatkan dari pos pengaduan akan dijadikan

bahan analisis yang akan dibawa kepada pihak terkait melalui mekanisme hearing.

Sedangkan kampanye antikorupsi meliputi; diskusi Antikorupsi dengan mahasiswa, jagongan rakyat, diskusi publik, pameran kartun antikorupsi, dan bioskop warga.

- Bioskop warga

Salah satu kegiatan Malang Corruption Watch (MCW) dalam melakukan pendidikan publik kepada masyarakat melalui bioskop warga. Bioskop warga menjadi alternatif MCW untuk menyampaikan isu soal pelayanan publik kepada masyarakat, melalui film-film yang sudah terklasifikasi dan dianggap bagus dan baik diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat dalam melakukan kerja- kerja advokasi, termasuk dalam melakukan diskusi soal pelayanan publik baik kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya.

Sebagai bentuk pemberdayaan komunitas, Malang Corruption Watch (MCW) melakukan kerjasama dengan

komunitas film “rollab.id” dimana distribusi film yang mendidik dan dapat menjadi motivasi warga menjadi pilihannya

- Penggunaan kanal Media Online

Dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan NGO serta dalam rangka kampanye antikorupsi di media online, maka dibutuhkan kanal yang mampu menjadikan program dan kampanye antikorupsi oleh NGO berjalan secara maksimal. Mengingat kebutuhan di era digital yang semakin pesat, MCW mengaplikasikan kegiatan tersebut terhadap beberapa kanal, yaitu Line, whatshap, facebook, twitter, dan web.

**Tabel 10. Perbandingan kanal yang digunakan
oleh MCW**

Kanal	Jenis	Deskripsi	Segmentasi
mcw-malang.org	Website	Sumber informasi dan publikasi utama tentang segala hal yang dilakukan MCW. Terdapat beberapa informasi mengenai kegiatan MCW, rilis pers, buku, dan opini, serta suara rakyat.	Umum, tersebar melalui media sosial MCW
Malang Corruption Watch	Facebook	Merupakan saluran informasi yg bersifat narasi dan foto kepada warga Malang	Warga Malang berusia (25 - 45 tahun).
@mcwngalam	Twitter	Saluran tweet 140 karakter, mengabarkan secara singkat kejadian yang ada	Organisasi lain dan aparaturn pemerintahan
@mcwngalam	Instagram	Berisi foto kegiatan atau agenda yang dilakukan oleh MCW. Dapat ditautkan ke media twitter	Mahasiswa (18 - 25 tahun)
MCW Malang / @hhj2245s	Line Official	Berisi narasi kegiatan dan foto MCW yang disampaikan ke pengguna line.	Mahasiswa (18-25 tahun)
Dialog Interaktif	ATV & RRI	Berisi siaran on air atau off air berupa dialog interaktif di radio dan televisi	Warga Malang Raya yang memiliki televisi dan radio
--	Konferensi Pers	MCW menyampaikan aduan kepada publik dan diliput di berbagai media massa lokal dan nasional.	Warga Malang Raya
Diskusi Mahasiswa, Diskusi Kalimetro, dll	Diskusi Publik	MCW menjadi narasumber di acara diskusi publik mahasiswa dan jarnagn OMS serta mengadakan kegiatan mandiri di wisma kalimetro	Mahasiswa (18 - 25 tahun)

- Pengawasan kepada pemerintah melalui regulasi

Pengawasan terhadap pemerintah adalah proses yang dilakukan oleh NGO dalam rangka pmenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan jati diri NGO, oleh karena itu MCW telah melaksanakan aktivitas tersebut dengan kegiatan sebagai berikut; pengawasan terhadap APBD Kota Malang, monitoring pelayanan publik,

pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, pengawasan terkait anggaran dinas.

-
- Pengaduan kasus melalui pengadilan dan institusi terkait

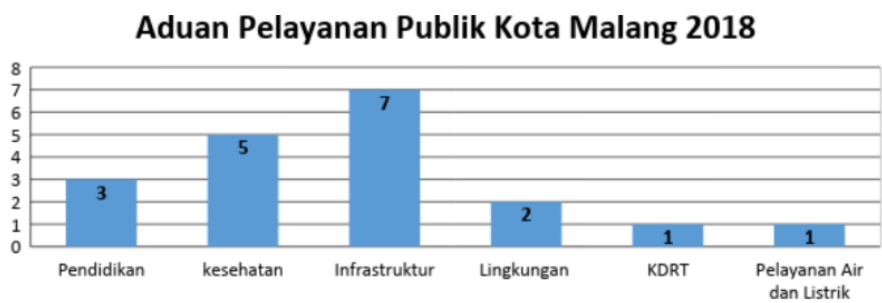
Pengaduan kasus adalah puncak dari tujuan advokasi NGO, dengan pengaduan kasus maka diharapkan NGO dapat memberikan efek yang nyata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, NGO telah melaksanakan advokasi dengan cara pengaduan kasus tersebut kepada Kepolisian dan kepada KPK.

Gambar 10. Sektor Aduan 2017 oleh MCW



Grafik: Pengaduan berdasarkan sektor

Gambar 11. Aduan Tahun 2018 Oleh MCW



Perkembangan kasus hasil aduan MCW dan forum warga kota Malang tahun 2017-2019.

Tabel 11. Perkembangan Aduan Tahun 2017-2019 Oleh MCW

NAMA KASUS	DESKRIPSI	SUMBER	PERKEMBANGAN	PERKEMBANGAN	PERKEMBANGAN
			2017	2018	2019
Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan UIN	Adanya dugaan penyalahgunaan dana pembebasan lahan UIN Kampus 3	Pengaduan	Ditangani oleh kejarai Malang. Dan sudah ada terpidana	PUTUSAN BANDING SUDAH ADA NAMUN BELUM ADA EKSEKUSI DARI KEJAKSAAN.	PUTUSAN BANDING SUDAH ADA NAMUN BELUM ADA EKSEKUSI DARI KEJAKSAAN.
Dugaan Korupsi Jembatan Kedungkandang	Terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses pemilihan rekanaan dan pengerjaan proyek	Temuan MCW	Ditangani Oleh Kepolisian		Masih ditangani oleh Kepolisian. Akan tetapi belum ada kejelasan lagi terkait dengan statusnya
Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang	Terdapat dugaan markup harga dalam proses Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang	Temuan MCW	Kejksaan menghentikan penyelidikan karena menganggap proses Pengadaan telah dilaksanakan sesuai aturan		Disampaikan kepada KPK
Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Kurikulum 2013 di PPPPTKBOE	Terdapat dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaan buku kurikulum 2013 di PPPPTK BOE	Pengaduan	Ditangani oleh polres	P-21 dari Kepolisian dan sudah ada 5 Terdakwa dituntut dipersidangan oleh Kejari Malang	Telah Ada putusan bersalah terhadap beberapa pihak P4TK
Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Drainase Jl Tidar dan bondowoso-kalimetro	Terdapat putusan sengketa perdata antara pihak pemkot dan kontraktor. Jalan diatas Proyek sempat amblas.	Temuan MCW	Belum ada tindak lanjut dari penegak hukum	Belum ada tindak lanjut dari penegak hukum	Belum ada tindak lanjut dari penegak hukum
Dugaan Korupsi Kendaraan Dinas Pada 4 SKPD	Terdapat 56 Kendaraan dinas yang tidak terdeteksi keberadaannya	Temuan MCW	Telah disampaikan kepada pihak kepolisian, namun belum ada perkembangan.	MCW terus berupaya mendorong agar penegak hukum Memproses Kasus ini	MCW terus berupaya mendorong agar penegak hukum Memproses Kasus ini
Korupsi Lab FMIPA UM	Penyalahgunaan Anggaran peralatan Lab FMIPA Um	Pengaduan	Ditangani oleh Kejaksaan	Putusan Kasisasi sudah ada, 2 Terpidana telah dieksekusi oleh Kejari Malang	Terdapat sejumlah pihak yang belum diproses oleh Kejaksaan, teruma actor intelektualnya

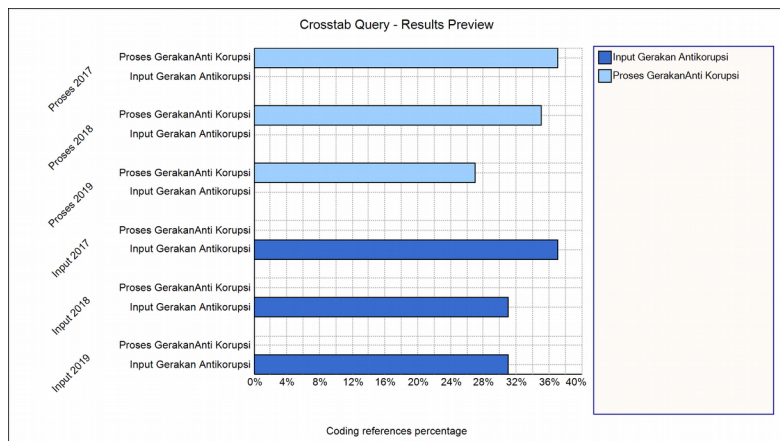
Pengaduan yang dilakukan oleh MCW bersumber dari laporan warga dan pengawasan oleh MCW sendiri. Hal tersebut dapat dikatakan efektif karena pengaduan yang dilakukan oleh MCW telah memperoleh beberapa perubahan dalam dinamika

kehidupan di kota Malang. Kasus kasus yang telah dilaporkan oleh MCW menjadikan indikator dalam efektifnya program yang menjadi proses program untuk dilihat di dalam output MCW.

4.3. Pendekatan Sasaran

Persentase perbandingan program MCW antara input dan proses tahun 2017-2019 sebagai berikut;

Gambar 12. Perbandingan antara Input Dan Proses Tahun 2017-2019



- **Pemahaman program**

Masyarakat binaan MCW mampu memahami program yang telah dirancang oleh MCW. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya program MCW dikalangan masyarakat umum dan komunitas binaan

MCW. Kemandirian yang dilaksanakan oleh forum warga menambah bukti, bahwa program yang dirancang MCW telah dipahami oleh masyarakat dan komunitas, dengan demikian pada tahap pemahaman program telah dianggap efektif.

- **Tepat sasaran**

Dalam melaksanakan program, MCW telah menetapkan sasarannya yaitu terhadap, Pemerintah, masyarakat umum, dan komunitas. Dalam tahap penentuan sasaran, MCW telah menentukan sasaran dengan baik. Akan tetapi sasaran tersebut belum maksimal tanpa diisi oleh sector swasta. Sehingga kelengkapan sasaran perlu dirumuskan kembali.

- **Tepat waktu**

Waktu yang telah ditetapkan oleh MCW dalam pencegahan korupsi politik di kota Malang terbilang belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan beberapa program yang telah di rencanakan berjalan dengan jangka waktu lamadan terbilang molor, sehingga beberapa program tidak

dapat dilaksanakan berulang kali. sehingga pada tahapan ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas berdasarkan ketepatan waktu menemui hasil yang tidak efektif.

- **Tercapainya tujuan dan perubahan nyata**

Indikator keberhasilan Output MCW

Dalam menjalankan program, MCW mempunyai indikator keberhasilan dalam langkahnya melakukan Pendidikan serta advokasi publik berkaitan dengan kasus Korupsi politik di kota Malang 2017-2019. Indikator tersebut sebagai berikut; 1. Warga mempunyai kepekaan dan keberanian terkait perlawanan terhadap korupsi, 2. Warga mampu mengadvokasi dan melaporkan kasus korupsi secara mandiri maupun kolektif, 3. MCW mampu mengkoordinir warga dalam membentuk zona zona antikorupsi di daerah masing masing, 4. Menjadikan forum warga sebagai sarana warga untuk kuat dalam berargumentasi terkait permasalahan korupsi, 5. Beralihnya forum warga menjadi gerakan antikorupsi secara kolektif untuk advokasi perlawanan korupsi.

Dampak advokasi MCW terhadap kinerja Pemerintah (ksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)

Hasil dari pengawasan yang dilakukan MCW menyatakan bahwa terkait kinerja Pemerintah tidak merambah kearah yang baik secara signifikan, perubahan hanya terkait dengan sistem pelayanan publik atau administrasi saja. Tetapi terkait dengan budaya tidak menunjukkan kearah positif.

Ketidak signifikan tersebut juga terlihat dengan sistem keterbukaan informasi di kota Malang yang masih buruk. Artinya beberapa Instansi pemerintah dan Lembaga Lembaga pemerintah tidak mau terbuka terkait dengan informasi yang seharusnya menjadi konsumsi publik.

Dampak advokasi MCW dilihat dari partisipasi masyarakat sipil berbasis warga

Dalam menjalankan advokasinya, MCW telah berjuang pada tingkatan masyarakat sipil. Bentuk perjuangan tersebut yaitu Pendidikan dengan cara

mentransformasikan ilmu terkait advokasi serta pemahaman terkait gerakan antikorupsi guna menjadikan warga sebagai lapisan terdasar dalam merawat gerakan antikorupsi di kota Malang tahun 2017-2019.

Lutfi Jayadi sebagai dewan Pembina MCW mengatakan bahwa dampak yang dirasakan langsung dalam aplikasi warga terhadap tindak pidana korupsi sebagai berikut;

- **Suara warga tampil diruang publik**

Suara warga mampu berargumentasi secara kuat dalam perlawanannya terhadap berbagai kasus tindak pidana korupsi di kota Malang. Warga mampu mempunyai *berginning posision* dalam melakukan advokasi terhadap berbagai persolan korupsi di lingkungan warga sekitar.

- **Warga punya kepeahaman dan kesadaran terhadap semangat antikorupsi**

Warga tidak hanya sekedar mengetahui terkait persoalan tindak pidana korupsi, akan tetapi warga

juga mempunyai kepehaman terkait buruknya tindak pidana korupsi yang akan terhubung pada sistem pembangunan moral yang berdampak pada etika atau tingkah laku baik dari element masyarakat atau pemangku kebijakan terkait dalam pembuatan *policy*. Sehingga warga kota Malang sadar akan pentingnya perlawanan terhadap tindak pidana korupsi yang jika dibiarkan nantinya akan berdampak buruk bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat dan dalam proses *sustainable development*.

- **Forum warga menjadi penggerak gerakan antikorupsi yang bersifat kolektif di tingkat kecamatan kota Malang.**

Berhasilnya pembuatan forum warga yang berdampak pada keaktifan warga atau beralihnya dari forum Pendidikan menjadi *movement* atau gerakan yang berbasis warga disetiap kecamatan di kota Malang. Sehingga aksi kolektif tersebut dapat menjadikan derajat masyarakat sipil menjadi tinggi dihadapan pemangku kebijakan ataupun politisi.

Dengan demikian pemangku kebijakan akan kesulitan jika akan melakukan perdagangan pengaruh saat menjelang kampanye ataupun setelah pilkadan tidak dapat dilakukan secara *massif*.

- **Terciptanya gerakan antikorupsi berbasis jaringan dari berbagai kalangan**

Terciptanya jejaring antikorupsi yang bersifat kolektif sebagai basis gerakan antikorupsi di tiap sektor, beberapa komunitas mulai aktif membangun diskusi diskusi antiorupsi hingga berdampak kepada pengawasan kebijakan.

Dampak advokasi MCW terhadap pemilu legislatif di kota Malang tahun 2019

Dalam hal ini, fakta dilapangan ditemukan bahwa warga masih menerima terkait dengan politik transaksional, hal ini terkait dengan sakit hati warga terhadap kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang pro-rakyat.

Akan tetapi terkait dengan ikut menjadi relawan politik transaksional semua warga tidak ikut terhadap hal demikian.

Terkait dengan pemilihan, warga memilih berdasarkan politik praktis yang terkadang tetap mengindahkan terkait dengan prinsip prinsip antikorupsi, meskipun warga paham secara kognitif, tapi hal tersebut tidak berlanjut kepada hal avektif dan psikomotorik.